

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akbar Patrialis, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta:Sinar Grafika.2013.

Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asshiddiqie Jimly,*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Kabaan Ramon,*Peran Kontrol Sosial Anggota DPRD Terhadap Pemerintah Provinsi*,Bandung:Penerbit Yrama Widya,2016.

Makarao Mohammad Taufik & Sarman,*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,Jakarta:Rineka Cipta,2011.

Moenta Andi Pangeran & Syafa'at Anugrah Pradana,*Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*.Depok:PT RajaGrafindo Persada.2018.

SihombingVictor M, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta,1998.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2008.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suwanda Dadang & Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Yang Efektif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2016.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wasistio Sadu & Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Peraturan Pemerintah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Internet

- Alfines Tunggal, 2013, *Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*, dilihat pada e-journal.uajy.ac.id.
- Baby Adhelia Z, Naskah Publikasi, 2017, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasn DPRD Kota Tanjung Pinang*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, dilihat pada repository.umrah.ac.id.
- Benny Abidin & Ratna Herawati, 2018, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang, Vol. 14, No.2, dilihat pada ejournal.undip.ac.id.
- Dedeh Haryati, 2010, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, kanjian, Vol 15, dilihat pada jurnal.dpr.go.id.
- Dhaifina Chaerunnisa Pradipta, 2018, *Implementasi Fungsi Penagawasan DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, dilihat pada repository.uinjkt.ac.id.
- Dian Chocho, *Pengertian, Fungsi, dan Asas Pemerintahan Daerah*, <http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html?m=1>
- DPRD Kab. Tegal, 2020, Badan Kehormatan, <https://dprd-tegalkab.go.id/badan-kehormatan/>.
- Fanklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan APBD di Kota Malang*, Vol.2, No.3, dilihat pada administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id.
- James Oyan, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Manado, diihat pada <https://ejourna.unsrat.ac.id/index.php/poitico/article/download/16799/16301>.

Juharni, 2016, Model Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai, Vol.3, No. 1, dilihat pada ojs.unm.ac.id.

Local Governance Support Program (LGSP), 2009, Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik, <https://adoc.tips/pengawasan-dprd-terhadap-pelayanan-publik-seri-penguatan-leg.html>.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, <https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/>.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, <https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/>

Pengertian Aparatur, <http://www.pengertianmenurutparahli.net/pengertian-aparatur/>

Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan, dilihat pada repository unpas.ac.id/4190906/1/j.%20BAB%2011.pdf.

Praptomo, Jurnal, 2016, *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Malang: Universitas Brawijaya, dilihat pada www.neliti.com.

Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016, Tentang DPR, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>.

Ubed Bagus Razali, *Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014*, Vol.5, dilihat jurnalfsh.uin.ac.id, 2015

Wikipedia, Pemerintah Daerah di Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia.

Wikipedia. "Pemerintah Daerah di Indonesia". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia.